

ABSTRAK

Eksplorasi anak sebagai pengemis terus menjadi permasalahan sosial serius di Kota Lhokseumawe, merenggut hak anak atas pendidikan dan perlindungan, serta mendesak implementasi efektif kebijakan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui program rehabilitasi Dinas Sosial, mekanisme sinergi antar aktor, serta distribusi bantuan sosial kepada kelompok sasaran. Fokus penelitian juga diarahkan pada identifikasi faktor-faktor penghambatnya berdasarkan kerangka *context of implementation* Grindle, untuk memahami tantangan nyata di lapangan. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dalam penanggulangan eksploitasi anak sebagai pengemis di kota Lhokseumawe yang terfokus kepada rehabilitasi, strategi antar aktor, dan bantuan sosial dalam program penanggulangan eksploitasi anak pengemis dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dalam penanggulangan eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe, terfokus kepada keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, yang ditentukan oleh lingkungan implementasi (*context of implementation*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan data dari wawancara mendalam dengan informan dari Dinas Sosial, Satpol PP, DP3A, DPRD, masyarakat, dan kelompok terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan melalui program rehabilitasi berjenjang (penyediaan rumah singgah, konseling psikologis, pelatihan keterampilan dasar, pembinaan karakter), dukungan penertiban yang mengedepankan pendekatan humanis oleh Satpol PP, serta kolaborasi fungsional dengan DP3A dalam pendampingan psikososial dan pemastian akses pendidikan. Meskipun demikian, efektivitas implementasi secara signifikan terhambat oleh sejumlah faktor kontekstual. Terutama, keterbatasan anggaran operasional dan minimnya sumber daya manusia di lembaga pelaksana (menunjukkan karakteristik institusi), kemiskinan keluarga yang mengakar kuat dan struktural sebagai pendorong utama (konteks sosial ekonomi), koordinasi antarlembaga yang masih bersifat *ad-hoc* dan belum terstruktur optimal, serta berbagai tantangan dalam dimensi penegakan hukum dan perlindungan korban/saksi, seperti kesulitan pembuktian dan lemahnya jaminan keamanan bagi pelapor (lingkungan hukum/rezim). Penelitian ini merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran dan sumber daya yang terarah, penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor yang formal, intensifikasi kampanye kesadaran publik yang menyentuh akar budaya permisif, integrasi program pemberdayaan ekonomi keluarga yang berkelanjutan, serta penguatan sistem hukum yang berpihak pada anak dan perlindungan korban.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Kebijakan Kesejahteraan Sosial, Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Tata Kelola

ABSTRACT

The exploitation of children as beggars remains a significant social problem in Lhokseumawe City, depriving them of their rights to education and protection, and underscoring the urgent need for effective implementation of social welfare policies as mandated by Qanun Aceh No. 11 of 2013. This research aims to comprehensively analyze the implementation of this policy, specifically focusing on the Social Service Agency's rehabilitation programs, inter-actor synergy mechanisms, and the distribution of social assistance to target groups. Furthermore, the study seeks to identify the hindering factors based on Grindle's 'context of implementation' framework to understand the practical challenges encountered. The objectives of this research are, therefore, to ascertain the implementation of social welfare policies in combating child exploitation for begging in Lhokseumawe City, concentrating on rehabilitation, inter-actor strategies, and social assistance within programs addressing child begging, and to identify the factors impeding the implementation of these social welfare policies, focusing on how the success of public policy implementation is determined by its environmental context. This study employed a qualitative research methodology, utilizing data collected through in-depth interviews with informants from the Social Service Agency, Public Order Agency (Satpol PP), the Office for Women's Empowerment and Child Protection (DP3A), the Regional People's Representative Council (DPRD), community members, and affected groups. The findings indicate that policy implementation involved tiered rehabilitation programs (including the provision of shelters, psychological counseling, basic skills training, and character development), enforcement support from Satpol PP emphasizing a humanistic approach, and functional collaboration with DP3A in providing psychosocial support and ensuring access to education. Nevertheless, implementation effectiveness was significantly hindered by several contextual factors. Primarily, these included limited operational budgets and insufficient human resources within implementing agencies (reflecting institutional characteristics); deep-seated and structural family poverty as a primary driver (socio-economic context); inter-agency coordination that remained largely ad-hoc and sub-optimally structured; and various challenges within law enforcement and victim/witness protection dimensions, such as difficulties in evidentiary processes and inadequate security guarantees for reporters (legal/regime environment). This study recommends increasing targeted budget allocations and resources, strengthening formal cross-sectoral coordination mechanisms, intensifying public awareness campaigns that address underlying permissive cultural norms, integrating sustainable family economic empowerment programs, and reinforcing a legal system that is child-centric and enhances victim protection.

Keyword: Child Exploitation, Social Welfare Policy, Policy Implementation, Poverty, Governance